

V. REKRUTMEN DAN POLITISASI ETNIS

Salah satu strategi yang digunakan partai untuk memperoleh simpati publik guna memenangkan suatu Pilkada adalah rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan proses perekrutan calon wakil kepala daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung dan alasan-alasan dibalik pemilihan Joko Umar Said sebagai calon wakil gubernur mendampingi Sjahroedin ZP. Apakah isu politisasi etnis ada di baliknya atau tidak.

A. Proses Rekrutmen Calon Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Lampung

PDI perjuangan dalam merekrut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Lampung mengacu pada SK No. 428/DPP/KPTS/XII/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rekrutmen calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pendaftaran, verifikasi, Rakerdasus, Survei, penetapan calon, dan pengesahan pasangan calon.

1. Tahap Pendaftaran

Pada tahap ini PDI-P membuka pendaftaran dengan mengumumkan di sejumlah melalui media massa lokal seperti Lampung Post, Radar Lampung, Lampung Express dan Fokus, serta melalui surat keputusan Rapat Koordinasi Kepala cabang-cabang untuk menginformasikan kepada warga masyarakat dan kader partai yang ingin mencalonkan diri. Waktu pengumuman adalah tanggal 16 s.d 18 September 2007.

Pendaftaran bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Lampung dari PDI perjuangan dilaksanakan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung di sekretariatnya pada tanggal 24 September s.d 5 Oktober 2007. Selama masa pendaftaran tersebut, terdapat 17 orang yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur. Pada ketujuhbelas nama tersebut, tidak hanya kader partai saja yang mendaftar tetapi juga dari non kader dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan. Berikut adalah tabel nama-nama bakal calon wakil gubernur:

Tabel 5

Nama-Nama Bakal Calon Wakil Gubernur yang Mendaftar

No	No Pendaftaran	Nama Lengkap	Lahir	Etnis	Pilihan	KET.
1	01/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Diana Tejo Surowijoyo	14 Januari 1969	Jawa	WA-GUB	Non Kader
2	02/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Jumali	Sungai Langka, 15 Mei 1959	Jawa	WA-GUB	Kader
3	03/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Heri gajah	B.Lmpung , 9-09-959	Banten	WA-GUB	Non Kader

4	04/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Ashari Herman syah	Teluk Betung, 6-11-1978	Lam pung	WA- GUB	Non Kader
5	07/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Yohana Tan Chi Chu	31 Januari 1957	Tiong hoa	WA- GUB	Non Kader
6	10/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Thomas Aziz Rizka, S.H, S.T	Tj.Karang, 11 Januari 1961	Lam pung	WA- GUB	Non Kader/ Partai Demokrat
7	13/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Drs. Syafiuddin Suhaili	Wonosobo 21-05- 1960	Lam pung	WA- GUB	Non Kader
8	14/PILHUB /DPD.12/IX 2007	H. Heri Prambono, S.T	Tj.Karang, 21 Juni 1961	Jawa	WA- GUB	Non Kader
9	16/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Mussadek Syaukat	Tj.Karang, 19-09- 1961	Lam pung	WA- GUB	Kader
10	17/PILHUB /DPD.12/IX 2007	M. Yusuf Kohar, S.E, M.M.	Palemban g, 19-09- 1951	Lam pung	WA- GUB	Non Kader
11	18/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Ir MS Joko Umar Said, M.M	Yogja karta, 11 April 1948	Jawa	WA- GUB	Non Kader
12	21/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Machyudin Gele Harun NST	B.Lmpung , 9-11- 1950	Lam pung	WA- GUB	Non Kader
13	22/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Suryono, SW	Madiun, 1 April 1949	Jawa	WA- GUB	Non Kader
14	23/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Edi Suparta Raswadi putra, S.H	Brebes, 24 Agustus 1951	Sunda	WA- GUB	Non Kader
15	24/PILHUB /DPD.12/IX 2007	H. Ahmad Komarudin, S.E	Metro, 24 Desember 1965	Lam pung	WA- GUB	Non Kader
16	25/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Drs. H. Ahmad Barzan, M.M	Lampung Barat, 2 Mei 1957	Lam pung	WA- GUB	Non Kader
17	26/PILHUB /DPD.12/IX 2007	Ketut Irawan, S.H	Bali, 10 Oktober 1960	Bali	WA- GUB	Kader/Ketu a DPC PDI P Lampung Timur

Sumber : DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Januari 2009

Dari ke 17 nama yang mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur, hanya terdapat 13 nama yang mengembalikan berkas pendaftaran dan melengkapi persyaratan. Adapun ke 13 nama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Nama-Nama Bakal Calon Wakil Gubernur yang Mengembalikan Berkas

No.	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	KLASIFIKASI
1.	Diana Tejo Surowuoyo	Wiraswsta	Non Kader (warga Masyarakat)
2.	Jumali	Wiraswsta	Kader/Anggota
3.	Yohana tan Chui Chu	Wiraswsta	Non Kader (warga Masyarakat)
4.	Drs. Syamlawi Lutfi Ning	Swasta	Non Kader (warga Masyarakat)
5.	H. Heri Prambono, S.T	Jasa Konstruksi	Non Kader (warga Masyarakat)
6.	Mussadek Syaukat	Wiraswasta	Kader/Anggota
7.	M. Yusuf Kohar, S.E., M.M.	Swasta	Non Kader (warga Masyarakat)
8.	Ir. MS joko Umar Said, M.M.	PNS	Non Kader (warga Masyarakat)
9.	Suryono, SW	PNS	Non Kader (warga Masyarakat)
10.	Edi Suparta Raswadiputra, S.H.	Advokat	Non Kader (warga Masyarakat)
11.	H. Ahmad Komarudin, S.E	Wiraswasta	Non Kader (warga Masyarakat)
12.	Drs. H. Ahmad Barzan, M.M	PNS	Non Kader (warga Masyarakat)
13.	Ketut Erawan, S.H.	Ketua DPRD Lampung Timur	Kader/Anggota, Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Timur

Sumber : DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Januari 2009.

2. Tahap Verifikasi

Verifikasi adalah penelitian terhadap seluruh kelengkapan persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Tahun 2004 dan Peraturan Partai yang dilakukan oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh DPP dan DPD Partai. DPP PDI perjuangan telah membentuk Tim verifikasi yang tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan No. 1672/IN/DPP/XI/2007 pada tanggal 5 November 2007 dengan personal : H. Dudhie Makmun Murod, MBA (Ketua DPP PDI Perjuangan) dan Ir Agnita Singedekane Irsal (Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan). Kemudian pada rapat pleno DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung ditetapkan lagi Tim verifikasi dari unsur DPD partai sebanyak 3 orang, yaitu : Sahzan Syafri, S.H, M.M (Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu), Mingrum Gumay, S.H (Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi), dan Palgunasi, S.T.P (Wakil Sekretaris Bidang Internal).

Pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan pada awalnya dilakukan pada tanggal 17 s.d 24 Oktober 2007. Akan tetapi hingga tanggal 31 Oktober 2007 DPP belum memutuskan Tim Verifikasi. Selain itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan adalah adanya kegiatan kampanye Bupati di Kabupaten Lampung Barat dan Tulang Bawang pada saat yang bersamaan. Sehingga pelaksanaan verifikasi baru diputuskan dalam rapat pleno DPD PDI perjuangan Provinsi Lampung yang dilakukan pada tanggal 13 s.d 16 November 2007.

3. Tahap Rakerdasus

Tahap Rakerdasus bertujuan untuk menentukan calon-calon yang memenuhi syarat secara internal partai. Peserta yang ikut memilih calon gubernur pada saat rakerdasus adalah pengurus DPD, Pengurus DPC kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung serta ketua, sekretaris/pengurus kecamatan yang ada di Provinsi Lampung. Jumlah peserta yang ikut memilih pada saat Rakerdasus sekitar 592 orang. Tahap Rakerdasus ini meloloskan 11 nama bakal calon wakil gubernur, yaitu Diana Tejo Surowijoto (non kader), Jumali (kader), Yohana Tan Chui Chu (non kader), Heri Prambono (kader), M. Yusuf Kohar (non kader), M.S Joko Umar said (non kader), Suryono S.W (non kader), H. Ahmad Komarudin (non kader), H. Ahmad Barzan (non kader), Samlawi Lutfi Ning (non kader) dan Ketut erawan (kader)

Setiap calon menyampaikan visi dan misinya secara lisan, kemudian peserta melakukan pemilihan calon yang dianggap pantas menjadi calon pemimpin. Pemilihan calon ini dilakukan dengan sistem *vooting* (pemungutan) suara. Nama-nama calon yang lulus dari hasil Rakerdasus diusulkan ke DPP partai.

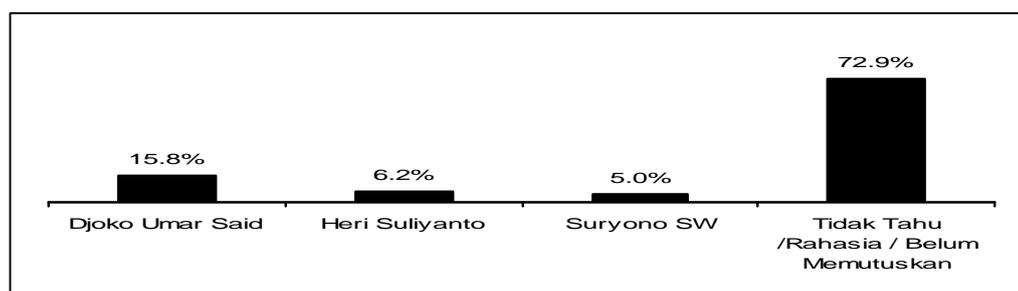
4. Tahap Survei

DPP mempunyai kewenangan melakukan survei calon-calon yang lolos verifikasi dan rakerdasus untuk dilakukan survei uji masyarakat langsung seperti popularitas dan dukungan calon-calon. Survei dilakukan oleh lembaga independen yaitu LSI. Survei dilakukan dalam beberapa tahap, yang pertama survei dilakukan terhadap nama-nama yang mendaftar di PDI perjuangan untuk dilihat popularitasnya di mata masyarakat. Kemudian tiga nama yang

memperoleh nilai persentase terbesar di survei ulang untuk melihat nama siapa yang paling pantas mendampingi Sjahroedin ZP. Hasil survei tersebut menyebutkan 3 nama yang dianggap pantas sebagai wakil gubernur untuk mendampingi Sjahroedin ZP adalah Joko Umar Said, Heri Suliyanto dan Suryono SW. Pada survei tersebut Joko Umar Said mendapatkan 15,8% suara, Heri Suliyanto mendapatkan 6,2% suara, Suryono SW mendapatkan 5,0% suara sedangkan sebanyak 72,9% menyatakan tidak tahu, rahasia dan belum memutuskan. Hasil dari survei tersebut dapat dilihat pada gambar

Gambar 1

Hasil Survei Terhadap 3 Nama Yang Dianggap Paling Pantas Sebagai Wakil Gubernur Mendampingi Sjachroedin ZP



Sumber : DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Januari 2009.

5. Tahap Penetapan Calon

Setelah dilakukan survei, DPP memutuskan siapa yang ditetapkan menjadi calon gubernur atau wakil gubernur berdasarkan parameter-parameter dari hasil verifikasi, hasil Rakerdasus dan hasil survei. Setelah diputuskan siapa bakal calon gubernur yang terpilih, DPP melakukan penetapan calon. Untuk calon wakil gubernur DPP merekomendasikan kepada DPD bahwa kepada calon gubernur terpilih diberi hak untuk memilih pasangannya dengan berkonsultasi kepada DPD secara kelembagaan dan dilaporkan kepada DPP.

Setelah melalui tahap Rakerdasus dan dibantu oleh tahap survei, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung merekomendasikan satu nama kepada DPP PDI Perjuangan di Jakarta yaitu Bapak Joko Umar Said untuk mendampingi Bapak Sjahroedin Z.P sebagai Calon Wakil Kepala Daerah.

Menurut Sahzan Syafri, S.H., M.H. yang merupakan Wakil Ketua Bidang Politik Dan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung ada dua faktor internal yang mendasari terpilihnya Joko Umar Said Calon Wakil Kepala Daerah. Yang pertama, Lampung merupakan propinsi yang mengandalkan sektor pertanian sehingga dipilih calon pendamping Sjachroedin ZP yang mengandalkan sektor pertanian sehingga dipilih calon pendamping Sjachroedin ZP yang menguasai bidang tersebut. Yang kedua, *Track record* atau latar belakang pak Joko baik prilaku, cara maupun sikap beliau yang konsisten.

Menurut Menurut P.Gultom yang merupakan wakil ketua bidang sumber daya DPP PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang mendasari terpilihnya Joko Umar Said sebagai calon wakil kepala daerah adalah Joko dinilai sebagai salah satu pejabat yang paling bersih. Di dalam semua pelaksanaan tugasnya, PDI Perjuangan melihat Joko merupakan orang yang jujur dan memiliki perhatian yang cukup besar kepada masyarakat petani.

6. Tahap Pengesahan Calon

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari PDI Perjuangan Terpilih disahkan oleh DPP untuk selanjutnya mendaftarkan diri di KPU Provinsi Lampung. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDI-Perjuangan yaitu Sjahroedin ZP-Joko Umar Said.

B. Politisasi Etnis : Strategi Perolehan Suara PDI Perjuangan

Etnis sebagai instrumen politik yang dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi massa memang dapat mendorong terjadinya fragmentasi di masyarakat, namun ketika berbicara permasalahan strategi politik, tentunya setiap partai melihat segala kemungkinan agar dapat mengakomodasi apa yang menjadi orientasi pemilih dalam memilih wakil kepala daerahnya, termasuk pula pada isu etnisitas.

Menurut Palgunadi selaku Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung di masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk memilih kepala daerah ataupun wakil kepala daerah berdasarkan kesamaan etnis. Sehingga secara politis akan lebih menguntungkan bagi PDI Perjuangan apabila memasang pasangan yang berasal dari etnis mayoritas di Provinsi tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh P. Gultom selaku Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Beliau mengungkapkan realitas di lapangan menunjukkan dalam menentukan pilihan politik, masyarakat pemilih masih menginginkan sosok yang memiliki kesamaan dengan pemilih, misalnya kesamaan etnis. Karena dengan adanya kesamaan tersebut masyarakat pemilih akan lebih merasa tersalurkan aspirasinya.

Penyandingan pasangan Sjahroedin-Joko merupakan kondisi dimana pasangan tersebut mewakili dua etnis terbesar di Provinsi Lampung. Di mana dalam perekrutan wakil kepala daerah faktor etnis diperhatikan. Suwondo mengatakan:

“....Sjahroedin pernah mengatakan bahwa dia menginginkan Jawa untuk mendampingi beliau. Pada waktu itu saya diminta oleh Pak Sjahroedin untuk menghubungi Pak Soeharto dan Pak Muhajir. Saya sudah

menghubungi Pak Soeharto dan untuk Pak Muhajir saya menyatakan tidak sepakat karena akan benturan jika berdua berpasangan. Tetapi kemudian Pak Soeharto menyatakan menolak akhirnya dia nyari yang laen baru kemudian muncul nama-nama baru seperti Pak Joko Umar Said, Suryono dan lain-lain....”

Dari pernyataan di simpulkan bahwa di dalam merekrut calon wakil kepala daerah PDI Perjuangan memperhatikan aspek etnis. Di mana nama-nama yang dipilih untuk mendampingi Sjahroedin adalah etnis Jawa. Nama Joko Umar Said sendiri terpilih setelah melalui beberapa tahap seleksi seperti verifikasi dan Rakerdasus dibantu dengan survei yang dilakukan oleh badan *independent* yaitu Lingkar Studi Indonesia (LSI). Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa Joko Umar Said memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi di banding kandidat calon wakil kepala daerah yang lain. Sehingga nama Joko Umar Said yang kemudian dipilih untuk menemani Sjachroedin.

Mingrum Gumay selaku Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan mengatakan :

“...PDI Perjuangan merupakan Partai Nasionalis yang tidak mempersoalkan suku, agama, ras dan ideologi dalam pemilihan seseorang untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Akan tetapi PDI Perjuangan memperhatikan beberapa aspek antara lain kemajemukan (kebhinekaan), kearifan lokal, dan suasana kebatinan rakyat...”

Dari pernyataan Mingrum Gumay dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang berbasis Nasionalis dimana dalam merekrut orang-orang untuk menempati jabatan-jabatan publik tidak mempersoalkan suku, agama, ras, dan ideologi dari calon. Akan tetapi PDI Perjuangan memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti, kemajemukan (kebhinekaan), kearifan lokal dan suasana kebatinan rakyat.

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang disebut dengan kemajemukan. Suku-suku bangsa tersebut menempati wilayah-wilayah dengan kultur budaya yang berbeda-beda sehingga masyarakat di wilayah yang satu memiliki keinginan atau kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat di wilayah lainnya. Keinginan dan kebutuhan itu biasanya disesuaikan dengan kondisi sosiologis dan antropologis akar budaya setempat. Hal inilah yang disebut dengan kearifan lokal.

Suasana kebatinan rakyat adalah suatu keadaan dimana keinginan rakyat menjadi penting. Sebuah kebijakan dibuat atau diambil dengan memperhatikan keinginan rakyat apakah akan menimbulkan resistensi konflik atau tidak dengan rakyat secara krusial. Dalam hal perekrutan untuk wakil kepala daerah PDI Perjuangan melihat bahwa masyarakat menginginkan calon kepala daerah dan wakilnya merupakan gabungan dari dua etnis terbesar (Jawa-Lampung) sehingga kemudian PDI Perjuangan mencari Etnis Jawa untuk mendampingi Pak Sjahroedin yang kebetulan sudah beretnis Lampung.

Pertimbangan etnis dalam perekrutan calon wakil kepala daerah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan memperlihatkan bahwa telah terjadi politisasi etnis. dalam proses rekrutmen pertimbangan etnis menjadi penting untuk mendongkrak perolehan suara dalam Pilkada. Para elite di PDI Perjuangan melihat bahwa di masyarakat faktor etnis masih diperhatikan sehingga perlu adanya upaya untuk memanfaatkan situasi ini guna mendongkrak perolehan suara dalam Pilkada 2008. Untuk itu Sjahroedin selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung

2005-2010 dan calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan menginginkan orang yang beretnis Jawa untuk mendampingi. Suwondo mengatakan:

“...secara *de facto* dia memperhatikan. Walaupun mungkin di luar jawaban dia tidak tetapi di dalam dia memperhatikan itu. Jadi ya pertimbangan-pertimbangan primordialisme itu masih ada, dengan tim-tim, orang-orang dekatnya itu masih dibicarakan. Tidak benar kalau dia bilang tidak ada, nyata nya ada itu pertimbangan-pertimbangan etnis. Secara ini...tidak salah kok, ini strategi...”

Pernyataan di atas menegaskan lagi bahwa memang di dalam perekrutan calon wakil kepala daerah yang dilakukan oleh PDI perjuangan mengandung unsur politisasi etnis. Hal ini sesuai dengan teori pandangan instrumentalisme dimana kaum instrumentalisme memandang kesadaran etnis sebagai hasil manipulasi dan mobilisasi politik elit yang berkuasa atau dalam pemahaman sederhana etnis adalah bentukan atau produk wacana politik elit yang berkuasa (Kinasih, 2005).